

PERALIHAN MODEL PERGERAKAN SEPARATISME ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DENGAN PEMANFAATAN STRATEGI NON-KEKERASAN PASCA TAHUN 2000

Ni Putu Triska Paramitha

Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga

Abstrak

Perjuangan melalui gerakan bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) nyatanya tidak memberikan hasil yang signifikan dalam meraih kemerdekaan. Kepentingan OPM dalam memisahkan diri atas kedaulatan Indonesia dilakukan dengan cara gerilya melalui penggunaan senjata, busur, dan panah. Namun, di awal tahun 2000an, perjuangan tersebut berubah ketika OPM mengurangi intensitas kekerasan ke perjuangan non-kekerasan. Strategi yang menggunakan kekerasan mulai berubah ketika dilaksanakannya Musyawarah besar (Mubes) dan Kongres Papua tahun 2000. Momentum ini mengubah strategi menjadi lobi politik atau non-kekerasan yang lebih diakui dan ditoleransi, diantaranya yakni pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di luar negeri. Peneliti menggunakan konsep dimensi perang ireguler milik James D. Kiras, seperti waktu, ruang, dukungan, dan legitimasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan efek dari internal dan eksternal faktor, yakni dinamika internal organisasi hingga menguatnya rezim HAM saat ini. Hal tersebut meruakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis mengapa OPM menggeser strateginya. Kemudian ditemukan bahwa terdapat beberapa fator penarik dan pendorong perubahan mekanisme dan dinamika masalah internal dalam OPM.

Kata – Kata Kunci: HAM, Indonesia, OPM, Papua, separatisme

The struggle through the armed conflict carried out by the Free Papua Organization (OPM) in fact, did not provide significant results in gaining independence. The interest of OPM to separate away from Indonesian sovereignty occur by guerilla methods which is using weapons, bows, and arrows. But, in the early 2000s, the struggle shift when OPM decreased intensity of violence to non-violence movement. Strategy involving the use of violence have begun to shift since the implementation of the Musyawarah Besar (Mubes) and the Papuan Congress in 2000. This has led to a change in strategy into political lobbying or non-violence which is more recognized and tolerated; such establish United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) abroad. The researcher used James D. Kiras concept about irregular war's dimension as a conceptual thinking, such as the effect of time, space, support, and legitimation. Besides of it, researcher also uses effect of internal and external factors, such as internal organization dynamics until the influence if strengthening human right regimes nowadays. Those are tools that researcher used to analyze why did the OPM shift their strategy. Then, the finding is some push and pull factor change the mechanism and internal problem dynamic on OPM.

Keywords: *Human rights, Indonesia, OPM, Papua, separatism*

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi yang muncul akibat adanya kekecewaan pasca ditetapkannya hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang mana mereka menilai bahwa hasil tersebut tidaklah valid. Dari total 809 ribu masyarakat Papua, yang melakukan voting hanya 1025 orang saja (Djopari 1993). Tindakan ini justru melanggar aturan yang telah dimandatkan dalam Perjanjian New York 1962 tentang mekanisme one man one vote. Peralihan kekuasaan dari United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) menjadi Indonesia dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka. Berbagai bentuk penyitaan dan perampasan barang milik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Papua seperti tempat tidur, mesin cuci, sepeda, vespa, hingga tangga pesawat dan dok apung diambil dengan alasan bekas peninggalan Belanda (Djopari 1993). Selain itu, kebijakan Indonesia dalam upaya integrasi Papua justru menimbulkan adanya konflik berkepanjangan yang terlihat saat ini. Adapun diantaranya kebijakan pertahanan seperti Operasi Tumpas 1964, Sadar, Baratayudha, Wibawa, hingga Operasi Sate pada tahun 1984 (Wardhani 2010). Kemudian, kebijakan percepatan ekonomi dengan program transmigrasi justru menimbulkan ketimpangan yang mana hanya penduduk transmigran yang mampu berkembang. Dari tahun 1971-2000, ada sekitar 719.866 jiwa masyarakat non-Papua yang menduduki wilayah strategis dengan tujuan untuk menekan persebaran OPM di sepanjang jalan raya Trans-Irian (Ondawame 2000).

Serangan OPM dan Pengembangan Strategi dari Tahun ke Tahun

Akibatnya, berbagai macam serangan dilancarkan oleh kelompok OPM yang diawali dari tahun 1965 pada Peristiwa Kebar yakni pasukan Johannis Djambuani menyerang upacara Sumpah Prasetya yang menimbulkan tiga korban jiwa dan hilangnya 9 pucuk senjata. Selain itu, serangan yang dianggap sebagai kemunculan OPM adalah peristiwa penyerangan Yonif 641 Cendrawasih I di Arfai dibawah pimpinan Permenas Ferry Awom (Djopari 1993). Peristiwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 3 orang dari pihak TNI dan 30 orang dari pihak OPM (Andrianto 2001). Kemudian, tahun 1967 dan 1968 serangan di Sukorem dan Ransiki oleh Jacob Rumbiak dan kawan-kawan menyebabkan 13 orang dari pihak OPM tewas. Peristiwa Irai Anggi 1968 menyebabkan munculnya 5 orang korban meninggal dunia dan 38 pucuk senjata dirampas dibawah pasukan Joseph Indey yang menyerang Komplek II 341 Siliwangi. Selanjutnya adalah peristiwa Enarotali 1969 oleh OPM Bernadus Wally yang menyerang kampung Dubu dan menewaskan 3 orang TNI. Peristiwa ini berlangsung cukup lama dari Februari 1969 hingga 30 Agustus 1969 yang mana mereka bertujuan untuk mengembangkan ideologi anti – Indonesia (Djopari 1993). Kemudian, tahun 1977 – 1978, OPM melakukan serangan pada pos-pos militer diantaranya pos Kabakma, pos Makki, pos Petriver, pos Kurubaga, dan pos Tiom. Tindakannya kemudian berubah menjadi pola-pola penyanderaan yang mana tahun 1979, OPM Marten Tabu menyandera seorang Camat Arso, Billy W. Jamlean. Kemudian tahun 1987, OPM Tadius Yoghi dan Daniel Kogoya menyandera 5 warga sipil untuk mendapatkan tebusan sebesar 2 milyar rupiah. Tahun 1995 dan 1996, OPM Tadius Yoghi, Kelly Kwalik, dan Daniel Kogoya secara terpisah menyandera 3 orang peneliti di Paniai dan 25 orang yang terdiri dari 12 penduduk, 10 peneliti dari Tim Ekspedisi Lorens, 3 periset WWF dan UNESCO, yang mana 7 di antaranya adalah Warga Negara Asing (WNA) (Djopari 1993).

Aksi radikal oleh OPM kemudian sempat terhenti ketika diselenggarakannya pertemuan antara Presiden B.J. Habibie dengan 100 orang tokoh Papua yang di dalamnya juga termasuk

kelompok OPM yakni Theys Hiyo Eluay (Broek dan Hermawan 2001). Namun, upaya damai dengan dialog yang di tempuh oleh tokoh – tokoh Papua tersebut nyatanya tidak membuahkan hasil sehingga konsolidasi tersebut dilanjutkan pada tahun 2000. Di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada peringatan ke – 38 Kemerdekaan Papua di Jayapura, beliau mengizinkan untuk mengibarkan bendera Papua dan menyanyikan lagu Hai Tanahku, Papua berdampingan dengan bendera dan lagu kebangsaan Indonesia (Anwar et. al 2005). Momentum tersebut berdampak pada diadakannya Musyawarah Besar (mubes) dan Kongres Papua II tahun 2000. Dari pertemuan tersebut kemudian melahirkan adanya Presidium Dewan Papua (PDP) (Anwar et. al 2005). Setelah dilaksanakannya mubes dan Kongres Papua II, intensitas penyerangan yang dilakukan oleh OPM semakin berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya data – data atau fakta yang menyebutkan serangan radikal OPM diberbagai daerah di Papua. Justru pasca tahun 2000, muncul banyak organisasi - organisasi besar yang mengatasnamakan diri sebagai sayap politik OPM yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Nasioal Papua Barat (PNPB), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) (Ondawame dan King 2001). Hingga kemudian di tahun 2014, organisasi-organisasi tersebut membentuk suatu wadah yang lebih besar di luar negeri yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tahun 2014 dengan tujuan untuk melaksanakan kampanye internasional.

Mengacu pada alur sejarah tersebut, intensitas serangan OPM mulai cenderung untuk menggunakan strategi non-kekerasan dan mengurangi aktivitas kekerasan. Meskipun sejatinya tidak meninggalkan cara-cara kekerasan sepenuhnya, kecurigaan muncul mengenai perilaku OPM yang mulai menerapkan strategi non-kekerasan dalam upaya perjuangannya. Hal ini berkaitan dengan alasan dibalik peralihan sikap OPM serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peralihan startegi tersebut. Untuk menjelaskan fenomena ini, peneliti menggunakan konsep perubahan strategi perang ireguler oleh James D. Kiras (Kiras 2007). Adapun asumsinya adalah perubahan strategi dapat terjadi didasarkan pada empat dimensi yang mempengaruhi; pertama, terkait dengan waktu, yang menjelaskan bahwa lamanya durasi perjuangan akan mempengaruhi jalannya pemberontakan tersebut; kedua, ruang, bahwasannya pemanfaatan pada lahan dan jangkauan yang kemudian dapat memberi keuntungan maupun kerugian terhadap pemberontak; ketiga, dukungan, terkait dengan opsi yang muncul sebagai tindakan aktor lain untuk mempermudah mobilisasi perjuangan, misalnya ketersediaan informasi dan bantuan lainnya; keempat, legitimasi yakni simpati yang diberikan oleh masyarakat sebagai dasar pembenar bagi suatu pemberontak untuk melakukan aksinya (Kiras 2007).

Selain itu, juga terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal. Secara sisi internal, terdapat faktor yang dipengaruhi oleh jumlah korban, keadaan topografi, serta dinamika etnis (Wardhani t.t.). pendapat ini juga ditambahkan bahwasannya perubahan sistem kepemimpinan juga mempengaruhi dinamika internal suatu organisasi. Hal ini tentu berujung pada adanya faksionalisasi dalam mencapai tujuan bersama (Dudouet 2013). Sedangkan, untuk sisi eksternal yakni menguatnya rezim HAM internasional yang saat ini mulai dipengaruhi oleh negara-negara. Bahkan negara-negara di dunia setidaknya meratifikasi satu dari sembilan perjanjian atau konvensi yang mengatasnamakan HAM (Hurst 2016). Sehingga, respon yang dilakukan oleh suatu negara atau masyarakat internasional akan lebih cepat jika permasalahan yang diangkat adalah isu HAM. Maka dari itu, dengan menggunakan konsep tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan apayang sesungguhnya terjadi sehingga OPM berusaha untuk menggeser strateginya yang semula dengan cara - cara kekerasan (militeristik) ke cara yang lebih non-kekerasan politis).

OPM Bukan Organisasi yang Monolit

Pada awal kemunculan OPM, perjuangan bersenjata dianggap suatu hal yang paling memungkinkan untuk dapat meraih kemerdekaan dibandingkan cara-cara persuasi atau dialog politis yang sekedar omong kosong (anonim t.t.). model penyerangan yang seringkali dilakukan adalah dengan metode hit and run menggunakan senjata seadanya seperti tombak, busur, panah, dan senjata hasil rampasan dari pihak TNI/Polri (MacLeod 2012). Selain itu, serangan tertutup yang dilakukan dengan menyerang pos-pos kecil kemudian beralih menyerang individu yang berpatroli, hingga melakukan penyanderaan memunculkan asumsi bahwa pola-pola tersebut terjadi tidak hanya untuk kemerdekaan melainkan untuk kepentingan sub kelompoknya saja. Sebagai contoh, penyanderaan tahun 1987 oleh OPM Tadius Yoghi dan Daniel Kogooya yang menyandera 5 orang warga sipil di Paniai dan hanya akan melepaskan sandaranya jika diberi tebusan sebesar 2 milyar rupiah. Selanjutnya, 1995, OPM Tadius Yoghi yang menyandera 3 peneliti yang salah satunya WNA Perancis hanya untuk mendapatkan 2 karung beras. Sedangkan penyanderaan yang dilakukan pada tahun 1996 oleh Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya terhadap 25 orang mengakibatkan adanya kontak senjata antara OPM dengan TNI yang mana dua dari 25 sandera tersebut terbunuh. Meski demikian, penyanderaan hanya untuk kepentingan kelompok semata kembali terjadi tahun 2001 yang mana OPM Willem Onde di Hutan Asiki, Merauke menyandera 3 orang warga sipil yakni Direktur PT. Korindo, Lee Jong Yong, Kwon Eduk, dan Kmelius Mayu. Mereka akan melepaskan sandera hanya jika diberi uang tebusan sebesar 2 juta dolar AS dari Korindo, serta dilunasi hutangnya di Bar Nikita sebesar 2,4 juta rupiah dan bon hotel sebesar 1,5 juta rupiah (Tempo t.t.).

Sehingga, dapat dipahami bahwa tidak terdapat satu komando yang solid dalam OPM tersebut. Jika dikilas balik, awal kemunculan OPM sejatinya telah mengalami perpecahan terutama yang memilih jalan kekerasan dan jalan politis. Adapun dua faksi yang dikenal secara umum sebagai cikal bakal OPM saat ini, yakni faksi Aser Demotekay dan faksi Terianus Aronggear (SE). Faksi Aser Demotekay sejatinya telah ada sejak 1963 namun baru muncul kepermukaan pada tahun 1970 di Jayapura. Faksi ini memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara-cara anti kekerasan berdasarkan gerakan kargoisme dan spiritual Kristen (Webster 2001). Sedangkan faksi Terianus Aronggear (SE) yang berdiri tahun 1964 di Manokwari menghendaki perjuangan dengan cara kekerasan. Adapun pengikut dari Terianus Aronggear ini adalah Permenas Ferry Awom yang melakukan serangan di Kebar, Manokwari 1965 yang serangannya sering dianggap sebagai kemunculan OPM. Serangannya ini juga dilakukan karena kekecewaan Awom atas ditangkannya Terianus Aronggear di Biak 12 Mei 1965 karena menyelundupkan dokumen untuk PBB ke Papua Nugini (Aditjondro 2000).

Menurut Timo Kivimaki dan Ruben Thorning (2002), OPM dikatakan terpecah ke dalam tiga bentuk utama. faksi Victoria yang dipimpin oleh Seth Rumkorem dengan sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau yang dikenal saat ini dengan TPN-OPM. Kedua, faksi Pemulihan Keadaan (PEMKA) yang diketuai oleh Jacob Prai dengan sayap militernya Pasukan Pembebasan Nasional (PAPENAL). Kedua kelompok ini sama-sama mengklaim sebagai pemegang otoritas di seluruh wilayah Papua. Ketiga, Presidium Dewan Papua (PDP) yang terbentuk pada Kongres Papua II tahun 2000. Ketiga bentuk faksi tersebut memiliki jalan yang berbeda dalam mencapai kemerdekaan. Markas Victoria (Marvic) disebut memiliki model pemerintahan yang revolusioner dengan gaya militan, sedangkan PEMKA pemerintahan yang secara de facto diakui di Papua yang berupaya dengan cara negosiasi. Di sisi lain, PDP murni memilih jalan politik yang didukung dengan adanya otonomi khusus (otsus) yang diberikan (Kivimaki dan Thorning 2002). Selain itu, adapun nama-nama tokoh OPM yang mendiami setiap wilayah dan mengatasnamakan diri sebagai panglima tertinggi untuk OPM di seluruh wilayah Papua. OPM Mimika dipimpin oleh Kelly Kwalik yang kemudian tertembak pada tahun 2010 dan digantikan oleh Ayub Waker, Teny Kwalik, dan germanus Elobo (Detik

News t.t.). OPM Puncak Jaya dipimpin oleh Goliath Tabuni yang mana tahun 2012 juga diakui sebagai panglima tertinggi oleh KNPB pada tahun 2012. Sejak saat itu, Goliath Tabuni menjadi satu-satunya objek persuasi yang ditargetkan oleh pemerintahan Joko Widodo (IPAC 2015).

Selanjutnya OPM Distrik Puncak di ketuai oleh bawahan Goliath Tabuni yakni Militer Murib dan Lelaka Telenggen. Hanya saja, Lelaka kurang menonjol yang hanya mengepalai unit OPM kecil di Kampung Yambi di Kecamatan Mulia. Selanjutnya, OPM Lanny Jaya yang dipimpin oleh Puron (Purom) Wenda yang juga merupakan saingan dari Goliath Tabuni. Kemudian, OPM wilayah Paniai dan Nabire yang dipimpin oleh Thadeus Yogi pada tahun 1970an kemudian banyak mengalami transisi kepemimpinan hingga tahun 2013 diambil alih oleh Leo Magai Yogi. Namun kemudian tahun 2015, Leo terbunuh dan belum ada penelitian yang menjelaskan siapa penggantinya. Untuk di wilayah northern coast seperti Serui, Biak, dan Sorong, pergerakan OPM kurang aktif. Adapun pemimpin yang diakui di wilayah tersebut yakni Richard Hans Yoweni dan disahkan pada tahun 2008 oleh West Papua National Coalition Liberation (WPNCL). Di wilayah Jayapura terkenal dengan kepemimpinan Danny Kogoya (hingga kini Egianus Kogoya), serta faksi OPM Biak yang bekerjasama dengan Goliath Tabuni diyakini polisi dikoordinatori oleh Mikael Marany, sedangkan OPM Sorong dipimpin oleh Isak Kalaibin telah ditangkap (IPAC 2015).

Deklarasi Kemerdekaan Papua: Secara Realita Masih dibawah Kedaulatan Indonesia

Dimensi waktu dalam asumsi Kiras dijelaskan bahwa dimensi waktu menjadi suatu tolak ukur bahwa suatu perjuangan digolongkan berhasil atau tidaknya (deadlock). Sehingga dengan demikian, menentukan strategi lain adalah cara yang memungkinkan untuk mencapai target kemenangan yang diinginkan (Kiras 2007). Asumsi ini juga didukung rentang waktu yang lama dalam meraih kemerdekaan juga dapat diakibatkan adanya dinamika internal yang akhirnya mengganggu jalannya perjuangan. Hal ini diakibatkan dengan adanya pergantian kepemimpinan baru tidak selalu menunjukkan adanya kesepakatan sehingga mempengaruhi pola-pola perjuangan yang dilakukan (Dudouet 2013). Maka dari itu, lamanya waktu perjuangan ini sangat rentan akan terjadinya perpecahan, keruntuhan, hingga adanya keberpihakan terhadap musuh.

Dalam perkembangannya, OPM telah melakukan deklarasi kemerdekaan berulang kali. Deklarasi Kemerdekaan Papua pertama kali dilakukan pada 1 Desember 1961, namun hingga sekarang Papua masih tetap dibawah kedaulatan Indonesia. Menurut Timo Kivimaki dan Ruben Thorning (2002), deklarasi telah dilakukan sebanyak tiga kali yakni tahun 1961, 1976, dan 1999. Namun, dalam hasil penelitian ini, peneliti menemukan deklarasi kemerdekaan juga dilakukan di tahun-tahun lain yang tidak disebutkan dengan jelas sebagai kemerdekaan Papua. Adapun deklarasi tersebut diantaranya; 1961, deklarasi kemerdekaan pertama OPM di Lapangan Imbi, Jayapura. Dibawah Dewan Nugini yang masih dalam pengawasan Belanda, diresmikanlah bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional dan Lagu “Hai Tanahku Papua” sebagai lagu kebangsaan Papua Barat (Papua) (Trajano 2010); 1965, deklarasi dilaksanakan di Kebar dipimpin oleh Lodwick dan Barren Mandatjan (Ondawame 2001); 1971, pada tanggal 1 Juli 1971 deklarasi kemerdekaan dilakukan oleh kelompok OPM Seth Rumkorem, Jacob Prai, Jarisetou Jufuway, dan Loui Wajoi di Desa Waris atau Marvic. Deklarasi ini terjadi sebelum OPM terpecah antara faksi Jacob Prai dengan Seth Rumkorem. Di tahun 1974, juga dilaksanakan Deklarasi Negara Melanesia Barat yang meliputi Sorong hingga Samarai (Suara Papua 2015). Namun, deklarasi ini kurang terdengar hingga seringkali dianggap bukanlah suatu deklarasi. Selanjutnya, deklarasi kemerdekaan tahun 1988 yang digagas oleh Dr. Thomas Wanggai.

Namun usaha ini juga dianggap tidak memberi pengaruh signifikan bahkan tidak cukup menarik perhatian Pemerintah Indonesia. Dalam jangka waktu yang cukup panjang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa OPM mulai memperhitungkan cara-cara yang lebih politis, sebab dengan cara kekerasan tidak kunjung memberikan hasil yang signifikan.

From Physical to Virtual, From National to International: Pengaruh Dimensi Ruang dan Dukungan dalam Pergeseran Strategi OPM

Eksistensi OPM dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan baik dalam lingkup nasional maupun internasional cukup kurang diperhatikan. Terlepas karena intervensi media dalam kasus kemerdekaan Papua yang terbatas, namun tertandingi dengan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia. Pembangunan jalan seperti Jalan Sentani – Jayapura sepanjang 34 km, Genyem – Boroway sepanjang 34 km serta pembangunan jalan Trans-Irian Jaya yang hampir mencapai 850 km yang dibagi dalam tiga tahapan yakni Jayapura-Abe-Ubrup-Oksibil, Merauke-Bupul-Tanah Merah-Digul, serta Nabire-Ilaga (Kompas t.t.). Dukungan kemudian terpecah antara kelompok pro-Indonesia dan pro-kemerdekaan. Selain itu, upaya untuk menentukan nasib sendiri tidak terlepas dari adanya dukungan eksternal yakni negara lain atau masyarakat internasional. Namun, eksistensi Indonesia sebagai negara yang berdaulat menjadikan setiap negara tidak berani mengambil keputusan untuk mendukung secara resmi kelompok separatistis. Kepentingan nasional suatu negara untuk melakukan hubungan diplomatis dengan Indonesia lebih penting daripada sekedar untuk mengintervensi urusan internal negara lain. Adapun dukungan yang muncul hanyalah bentuk simpati, bukan official statement. Sehingga kurangnya dukungan internasional ini menjadi alasan bagi OPM untuk melakukan peralihan strategi yang lebih non-kekerasan.

Sehingga dengan kaitannya dengan dimensi ruang, untuk mendapatkan dukungan tersebut perlu dilakukan pergeseran “meda perjuangan”. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya istilah from physical to virtual dan from national to international. Pertama, from physical to virtual dipahami sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi, terutama internet untuk memperoleh dukungan internasional. Dalam segi fisik, ruang gerak OPM cukup terdesak dengan dibangunnya Daerah Operasi Militer (DOM) serta dilancarkannya banyak operasi khusus dalam proses Integrasi Papua. Selain terkait dengan ruang secara geografis yang semakin ditekan oleh militer Indonesia, akses yang bebas juga tidak diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pihak-pihak yang mendukung pro-kemerdekaan. Sebagai contoh, tulisan orang Papua yang menggambarkan keadaan Papua ditarik dari pasaran karena dianggap menciptakan keresahan di masyarakat (Sugandi 2008). Maka dari itu, media internet kemudian dilirik sebagai tempat yang paling memungkinkan untuk melakukan perjuangan sebab untuk menunggu media dalam melakukan penelusuran atas kasus Papua telah tidak mungkin. Kemudian, pemanfaatan media internet juga dipertimbangkan dengan ongkos yang dikeluarkan lebih murah, tidak menimbulkan korban jiwa, serta lebih mungkin untuk menjangkau masyarakat internasional.

Kedua, from national to international dipahami bahwa posisi OPM sebagai inferior atas pemerintah Indonesia menjadikan ruang gerak dalam negeri tidak lagi memberi dampak signifikan atas perjuangan OPM. Sehingga, OPM memanfaatkan tokohnya yang berada di luar negeri seperti Markus Kaisiepo dan Nicholas Jouwe yang sebelumnya pada tahun 1962 mencari suaka ke Belanda, Herman Womsiwor dan Ben Tanggahma yang mengasingkan diri ke Senegal, serta Benny Wenda yang mencari suaka politik ke Inggris (Pamungkas 2017). Kemudian, tokoh atau diaspora tersebutlah yang membangun narasi perjuangan OPM di luar negeri. Kampanye maupun lobi ini kemudian dilakukan secara masif di luar negeri terbukti dengan dibentuknya

ULMWP tahun 2014. Bahwasannya skema yang berusaha dibangun adalah dengan adanya pergeseran ruang akhirnya dapat menarik dukungan masyarakat internasional.

Legitimasi Non Formal OPM yang Fluktuatif

Terkait dengan legitimasi, ditekankan mengenai pemberian legitimasi yang bersifat non-formil. Hal ini dimaksudkan bahwa suatu aktor non negara (kelompok separatis) dapat memiliki hak untuk bertindak yang berdasarkan pada dukungan dan kekuatan dari rakyat. Sehingga, meskipun kelompok separatis tidak memiliki legitimasi secara demokratis, dukungan dan kepercayaan rakyat menjadi pembenar atas segala tindakannya. Selain itu, dukungan dan kepercayaan yang muncul tersebut dapat berupa sumbangan finansial serta penerimaan ide provokatif oleh masyarakat yang disebarkan oleh kelompok separatis tersebut (Porte 2012). Legitimasi ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingannya di ranah global. Untuk memahami legitimasi yang diterima oleh OPM tersebut dapat dilihat dari dua sisi yakni legitimasi internal dan eksternal yang kemudian dapat menguatkan serta melemahkan posisi yang dimiliki oleh OPM.

Pertama dilihat dari sisi internal. Secara umum legitimasi OPM muncul dari adanya pendukung yang berasal dari tiga golongan, yakni; pertama, masyarakat kelas bawah dari berbagai kelompok suku yang tinggal di wilayah strategis; kedua, masyarakat kelas menengah atau sebagian besar disebut juga kelompok terpelajar yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan pegawai negeri sipil yang melakukan desersi; ketiga, kalangan militer yang melakukan disersi atau pembelotan (Susilo 2001). Eksistensi orang Papua semakin terlegitimasi dengan diterbitkannya UU No.21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua. Peraturan ini memberikan kebebasan bagi masyarakat Papua untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri yang dibuktikan dengan dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang bertujuan sebagai perwakilan masyarakat Papua dan wadah untuk menampung aspirasi dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan adat-istiadat maupun keragaman sosial budaya (BPHN t.t.). Selain itu, hal yang paling krusial adalah pemberian hak untuk mengibarkan bendera Sampari dan menyanyikan lagu “Hai Tanahku, Papua” setelah pengibaran Bendera Merah Putih dan nyanyian Indonesia Raya. Meskipun memiliki otonomi khusus, Papua dilarang memiliki aparat keamanan. Sehingga budaya impunitas yang dimiliki oleh aparat keamanan Indonesia (TNI/Polri) masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang menolak untuk tunduk terhadap pemerintah Indonesia.

Kemudian, di sisi lain legitimasi OPM melemah dikarenakan upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia di Papua meskipun tidak sepenuhnya dikatakan berhasil, memiliki pengaruh melemahkan semangat pro kemerdekaan. Hal ini hampir serupa dengan bagaimana menjelaskan strategi perjuangan yang berubah dari segi dimensi dukungan dalam membentuk persepsi masyarakat atas OPM. Pro dan kontra atas tindakan yang dilakukan oleh OPM kemudian menjadi suatu pertentangan dalam mencapai legitimasi. Banyak masyarakat Papua yang mulai mendapatkan kedudukan penting dalam pemerintahan menyebabkan legitimasi OPM atau masyarakat yang anti-Indonesia semakin menurun. Sehingga alternatif lain yang mereka gagas adalah menciptakan pola pergerakan perjuangan baru di luar negeri. Sebagai contoh pembentukan National Coalition dan United Fronts dengan tokoh Amos Indey, Rumkorem, dan Toto. Upaya ini dilakukan dengan menghimpun organisasi anti-Indonesia yang telah ada dari tahun 1960an yakni Semangat Angkatan Muda Papua Anti Republik Indonesia (SAMPARI), Operasi Organisasi Papua Merdeka (OOPM) dan gerakan Nasional Papua (GNP) (Wospakrik 2018).

Kedua, dilihat dari sisi eksternal, legitimasi muncul dari pandangan OPM bahwa HAM yang dinilai dapat menjadi batu loncatan untuk menyebarkan propaganda anti-Indonesia serta menarik simpati yang lebih besar dari masyarakat internasional. Budaya impunitas yang dilakukan oleh aparat keamanan kemudian disebar oleh OPM melalui media masa yang akhirnya memicu protes internasional terhadap Indonesia (Wardhani t.t.). Strategi yang perlahan meninggalkan model gerilya seperti munculnya aktifis pro Papua, demonstrasi, hingga petisi dianggap dapat memberikan opsi baru dalam perjuangan. Hal ini cukup menguntungkan ketika para aktifis atau demonstran ditangkap, maka dengan mudah mereka menggalang dukungan internasional dengan mengatasnamakan adanya pelanggaran HAM (Mahmudi t.t.). Selain itu, isu ketidakadilan dan kemiskinan juga kerap digunakan sebagai alat untuk memperoleh pembenaran dari negara asing. Legitimasi dari segi eksternal ini kemudian dapat lebih dijelaskan dengan kaitannya dengan menguatnya rezim HAM internasional.

Internasionalisasi Isu HAM sebagai Cara Untuk Memperoleh Dukungan Internasional

Runtuhnya rezim Soeharto dan dimulainya era reformasi menjadikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan seluas-luasnya, dapat mengekspresikan keinginan dalam bentuk demonstrasi maupun dialog. Momentum ini juga memberi ruang bagi masyarakat khususnya tokoh-tokoh OPM untuk terlibat secara aktif dalam upaya perjuangan kemerdekaan Papua (Rusdianti dan Pamungkas 2017). Dilakukannya Musyawarah Besar (Mubes) dan Kongres Papua tahun 2000 membentuk lembaga baru yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah bentuk akomodasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua. Selain itu, lembaga yang terbentuk adalah PDP. Berdasarkan penelitian LIPI, Presidium Dewan Papua (PDP) lahir pada era transisi demokrasi yang mana ruang gerak mulai lebih terbuka daripada pada era OPM (Rusdianti dan Pamungkas 2017). Hal ini juga mengakibatkan adanya dua pandangan yang menyatakan bahwa OPM dengan PDP memiliki tujuan yang sama namun jalan yang berbeda. OPM bertindak dengan cara kekerasan sedangkan PDP melalui cara-cara dialog politik. Lebih lanjut, transisi masyarakat Papua ke arah yang lebih demokratis terlihat saat pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua. Hal ini terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui draft UU Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua pada tahun 2001. Anggaran yang diterima masing-masing empat belas kabupaten mencapai 28 miliar dari keseluruhan 440 miliar untuk program pembangunan wilayah pedesaan (Anwar et al 2005). Sejalan dengan pemberian otonomi khusus tersebut melahirkan dua lembaga baru yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) dan badan legislatif khusus Papua yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). MRP dibentuk pada tahun 2005 sebagai majelis yang merepresentasikan masyarakat Papua dan berwenang untuk melindungi hak-hak masyarakat Papua, memberdayakan perempuan, dan kerukunan umat beragama yang berlandaskan penghargaan terhadap adat dan budaya (BPHN t.t.).

Era Reformasi ini juga menjadikan tokoh OPM dalam negeri lebih mudah melakukan interaksi dengan tokoh OPM luar negeri. Di samping dalam negeri mulai menjamur LSM yang mendukung kemerdekaan Papua dari cara menunjukkan pelanggaran HAM di Papua, organisasi yang digagas oleh OPM di luar negeri juga cukup memiliki peran signifikan. Muncul beragam organisasi politik yang mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan Papua serta memiliki hubungan dengan OPM dalam negeri. Pertama, The Free West Papua Campaign yang didirikan oleh Benny Wenda pada tahun 2000 di Inggris. Sebelumnya, Benny Wenda merupakan terduga dalam kasus penyerangan kantor polisi di Abepura dan melarikan diri ke Papua Nugini hingga akhirnya mendapatkan suaka politik di Inggris. Kedua, West Papua National Authority (WPNA) yang berdiri tahun 2004 dengan tujuan sebagai wadah dari sayap

politik OPM. Organisasi ini dibentuk oleh Edison Waromi, Herman Wanggai, dan Jacob Rumbiak.

Ketiga, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang berdiri tahun 2005 oleh OPM Pemka, Otto Ondawame. Dalam organisasi ini, Mathias Wenda menjadi pimpinan tertinggi. Tujuan dari organisasi ini adalah sebagai sayap politik dari OPM namun ditolak gagasannya oleh OPM dalam negeri yakni Goliath Tabuni dan Kelly Kwalik. Keempat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dibentuk tahun 2008 dengan ketua Buchtar Tabuni. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah aspirasi politik masyarakat Papua dan membangun hubungan dengan OPM bersenjata pada era Victor Yeimo tahun 2012 (Detik News 2018). Sedangkan versi LIPI menyebutkan bahwa disamping keberadaan WPNCL, terdapat dua organisasi baru yang muncul setelah diadakannya Konferensi Perdamaian Papua tahun 2011 yakni Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dibentuk tahun 2011 pada Kongres Rakyat Papua III dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) tahun 2012 (Rusdianti dan Pamungkas 2017). Kedua organisasi tersebut selain PNWP berusaha untuk dapat diterima keanggotaannya dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sehingga organisasi-organisasi ini berkembang secara masif untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Salah satu wujud yang akhirnya dilakukan adalah bersatu dalam satu wadah yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tahun 2014. Organisasi ini dibentuk untuk merepresentasikan keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri, yang mana cara yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan Melanesian Ways yang dipegang teguh oleh Melanesia Spearhead Group (MSG) bahwa seluruh bangsa Melanesia harus merdeka dari penjajahan (Tirto 2019). Dengan demikian, HAM akhirnya digunakan sebagai senjata oleh ULMWP yang mana presiden ULMWP, yakni Otovianus Mote menyampaikan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam Kongres Amerika Serikat. Ia menyebutkan bahwa aparat militer Indonesia mengintimidasi orang Papua dengan penyebutan yang kurang manusiawi, seperti bajingan, anjing, kotoran Wonda dan Dipes Tabuni, serta bentuk penyiksaan lain diantaranya diancam dengan pisau dan dibakat alat kelaminnya ketika menanyakan tentang informasi keberadaan OPM (Anonim t.t.).

Selain itu, berikut pelanggaran HAM yang digunakan sebagai alat propaganda diantaranya pembunuhan wanita dan anak-anak oleh Pasukan Indonesia tahun 1970, Empat wanita dari desa Piramid sebagai budak seks selama satu bulan sebelum asam baterai kering dimasukkan ke dalam vagina dan kembali ke desa. Dilakukan oleh ABRI Unit 752, 753 dan Polisi di bawah komando Kolonel Albert Dieng tahun 1978, serta masih banyak lainnya. Upaya ini kemudian menarik bagi negara lain dan organisasi internasional untuk turut campur dalam kasus ini. Adapun Vanuatu, FLNKS, Kepulauan Solomon, serta organisasi-organisasi internasional seperti TAPOL, Oxford Papua Rights Campaign, International Action for West Papua, Cultural Survival, dan Australia West Papua Association membuktikan bahwa lobi politik OPM melalui ULMWP (Pamungkas 2017).

Kesimpulan

Dengan demikian perlu disimpulkan bahwa peralihan strategi yang dilakukan oleh OPM hingga terbentuk menjadi ULMWP dikarenakan ada friksi internal. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan muncul berbagai faktor seperti perubahan kepemimpinan, lamanya waktu perjuangan, terdesaknya ruang gerak, hingga momentum besar yakni era reformasi yang ditandai dengan bebasnya akses informasi dan menyampaikan aspirasi. Selain itu, OPM sebagai organisasi yang telah ada sejak tahun 1965 tentunya bukan lagi organisasi biasa yang akan melakukan perubahan strategi hanya dikarenakan oleh masalah-masalah kecil. Segala kemungkinannya pasti

telah diperhitungkan oleh OPM sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pergeseran strategi perjuangan. Perlu diingatkan bahwa meskipun dalam hal ini peneliti menjelaskan terjadi peralihan strategi perjuangan yang semula bersenjata kini menjadi gerakan-gerakan politis, bukan berarti OPM meninggalkan metode lamanya seperti bergerilya. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggarisbawahi bahwa memang terjadi penurunan intensitas serangan pasca tahun 2000, yang mana pemberitaan terkait serangan OPM tidak banyak dimuat. Meski demikian, penelitian ini akan cenderung terlihat bias. Namun, perlu diketahui bahwasannya untuk memberikan data dan fakta melalui dua sudut pandang nyatanya sangat sulit dilakukan. Khususnya dalam mencari data dari sisi Indonesia pada kasus separatisme Papua, sangat sedikit peneliti maupun institusi yang menjelaskan secara detail. Sedangkan dari sisi OPM sendiri, data-data sangat udah ditemukan terlepas apakah data tersebut telah mewakili seluruh fakta dilapangan. Sehingga peneliti tidak menutup celah bagi peneliti lain untuk kembali menyempurnakan hasil penelitian ini. Sedikit gambaran tentang Papua saat ini yakni pasca tahun 2000, khususnya pada zaman pemerintahan Joko Widodo saat ini, pembangunan mulai difokuskan pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Khususnya di wilayah Papua, penyamaan harga BBM diseluruh wilayah kota-kota Papua dengan di pulau Jawa, pembangunan infrastruktur, dan perhatian terhadap pendidikan menjadikan saat ini Papua memiliki nilai tawar yang cukup tinggi di mata pemerintah Indonesia. Sedangkan di lain sisi, pergerakan masif yang dilakukan oleh OPM melalui ULMWP di luar negeri pun tidak kalah penting mengingat lobi-lobi politik yang dilakukan melalui isu identitas dan HAM menjadi sangat krusial dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara lain dalam memberikan dukungan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal Online

- Aditjondro, George Junus. 2000. *Cahaya Bintang Kejora; Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*. Jakarta: Elsham.
- Dudouet, Veronique. 2013. "Dynamics and Factors of transition from armed struggle to nonviolent resistance", *Journal of Peace Research*.
- Hurst, Hannum. 2016. "Reinvigorating Human Rights for the Twenty-first Century", *Human Rights Law Review*. Oxford.
- Kivimaki, Timo dan Ruben Thorning. 2002. "Democratiation and Regional Power Sharing in Papua/Irian Jaya: Increased opportunities and decreased Motivations for Violence", *Asian Survey* 42(4).
- Kiras, James D. 2007. "Irregular Warfare: Terrorism and Insurgency", dalam John Baylis et. al. (ed.), *Strategy in the Contemporary World*. Oxford: Oxford University Press.
- MacLeod, Jason. 2012. *Nonviolent Struggle in west Papua: "We have A Hope"*. [online], dalam <http://www.eolss.net/Eolss-sampleAllChapter.aspx>, 7-8.

- Ondawame, John dan Peter King. 2001. "West Papua: Exploring the prospects of Peace with Justice". *Centre for Peace and Conflict Studies*. The University of Sidney.
- Porte, Teresa La. 2012. *The Legitimacy and Effectiveness of Non-State Actors and the Public Diplomacy Concept*. [online]. Dalam <http://files.isanet.org/ConferenceArchive/58816b94a39845d9a5b618ae52e7c80c.pdf> diakses pada 20 Mei 2019.
- Wardhani, Baiq L.S.W. t.t. "Papua On The Net", *Globalisasi Konflik & Etnis*. [online]. Dalam http://www.academia.edu/971617/Papua_on_the_Net diakses pada 11 Januari 2019.
- Webster, David. 2001-2002. "Already Sovereign as a People": *A Foundational Moment in West Papuan Nationalism*, Pacific Affair.
- Wospakrik, Decky. 2018. *Gerakan Separatisme di Papua mengurai Konflik dan Solusi Penyelesaian Papua-Jakarta*. [online]. Dalam https://www.researchgate.net/publication/328063919_Gerakan_Separatisme_di_Papua_mengurai_konflik_dan_solusi_penyelesaian_Papua-Jakarta diakses pada 20 Maret 2019.

Buku

- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001. *Mengapa Papua Bergolak?*. Yogyakarta: Gama Global Media..
- Djopari, John RG. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Porte, Teresa La. 2012. *The Legitimacy and Effectiveness of Non-State Actors and the Public Diplomacy Concept*. [online]. Dalam <http://files.isanet.org/ConferenceArchive/58816b94a39845d9a5b618ae52e7c80c.pdf> diakses pada 20 Mei 2019.
- Riella Rusdiarti, Suma dan Cahyo Pamungkas. 2017. *Updating Papua Roadmap: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. Jakarta: Obor.
- Susilo, I. Basis, at al. 2001. *Final Report: Kebijakan RI Di Pasifik, Upaya Mencegah Separatisme di Irian Jaya*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri dan FISIP Universitas Airlangga.

Buku Online

- Ondawame, Otto. 2000. "One People, One Soul" *West Papuan Nationalism and the Organisasi Papua Merdeka(OPM)/Free Papua Movement*. Disertasi. The Australian National University.
- Dewi Fortuna Anwar et al. 2005. *Internal Conflict in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*. Jakarta: Obor. [online]. Dalam <https://books.google.co.id/books?id=yGDsxghgftQC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=musy+awarah+besar+papua&source=bl&ots=d1J5YADE3Y&sig=ACfU3U2ktvfDsS2oM3kXn7Y2Ir7qQdugKg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi17JiKv7jhAhWg8XMBHdOdDoM4ChDoAT>

AAegQIAxAB#v=onepage&q=musyawarah%20besar%20papua&f=false diakses pada 5 April 2019.

Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. [online]. Dalam <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/06393.pdf> diakses pada 18 Maret 2019.

Trajano, Julius Cesar I. 2010. "Ethnic Nationalism and Separatism in West Papua", *Journal of Peace, Conflict and Development*, Indonesia.

Van Den Broek, Theo P.A. dan J. Budi Hermawan. *Memoria Passionis di Papua, Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999*. 2001. [online]. Dalam https://www.papuaergoed.org/files/Broek%20van%20den_2001_memoria.pdf diakses pada 21 Mei 2019.

Situs Resmi

Anonim. *A Written Statement of Mr Octovianus Mote*.t.t. [online]. Dalam http://www.faithbasednetworkonwestpapua.org/news_release/a_written_statement_of_mr_octovianus_mote diakses pada 21 Mei 2019.

_____. *The Liberation Army of the Free Papua*. t.t. [online]. Dalam <http://www.eco-action.org/opm/index.html> pada 28 Agustus 2018.

_____. *A Written Statement of Mr Octovianus Mote*.t.t. [online]. Dalam http://www.faithbasednetworkonwestpapua.org/news_release/a_written_statement_of_mr_octovianus_mote diakses pada 21 Mei 2019.

Institute for Policy Analysis of Conflict. 2015. *IPAC Report No. 21: The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement*.

Media Online

Detik News. 2018. *OPM Pecah sejak Dini, Siapa Pemimpin Tertingginya Kini?*. [online]. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-4346104/opm-pecah-sejak-dini-siapa-pimpinan-tertingginya-kini> diakses pada 26 Maret 2019.

Kompas. t.t. *Janji Untuk Papua*. [online]. Dalam https://arsip-interaktif.kompas.id/pembangunan_papua diakses pada 20 Maret 2019.

Suara Papua. 2015. *Makna 1 Desember 1961 Bagi Rakyat Papua*. [online]. Dalam <http://suarapapua.com/2015/11/29/makna-1-desember-1961-bagi-rakyat-papua/> diakses pada 18 Februari 2019.

Tempo. 2001. *OPM Setelah Serangan dari Hutan Asiki*. [online]. Dalam <https://majalah.tempo.co/read/77145/opm-setelah-serangan-dari-hutan-asiki> diakses pada 24 Februari 2019.

Tirto. 2019. *Siapa Kawan dan Siapa Lawan Indonesia di Melanesia soal Papua Merdeka?*. [online]. Dalam <https://tirto.id/siapa-kawan-dan-lawan-indonesia-di-melanesia-soal-papua-merdeka-df4R> diakses pada 16 April 2019.

